

Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MTs YPI SubululHuda Saentis

Hasana Fadilla¹, Casyariadi Vana Hafizah², Filma Muhazri Sembiring³,
Alfieridho El Musyri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

E-mail : hasanahfadhillah06@gmail.com, 1201casyariadivanahafizah@gmail.com

Abstract

The research aims to determine the policy of madrasah principal in improving the performance of their employess, which in this case is the performance is the result of the work process. This research was carried out using observation, analysis, interview techniques and understanding from the two different sources, then the researcher also referred to journals, books, as well as other previous research literature. The results of the research show that there are several policies made by the principal at MTs YPI Subulul Huda Saentis to improve teacher performance management strategies and practices schools can optimize teacher and student performance, achieve better educational goals, and contribute to improving the overall quality of education.

Keywords: Policy, Teacher Performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja pegawainya, yang dalam hal ini adalah kinerja dari guru. Istilah kinerja tidak dapat dipisahkan dengan bekerja karena kinerja merupakan hasil dari proses bekerja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, menganalisis, wawancara serta memahami dari kedua narasumber yang berbeda tersebut, kemudian peneliti juga merujuk pada jurnal, buku, serta literatur-literatur penelitian terdahulu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwaterdapat beberapa kebijakan yang di buat oleh Kepala Sekolah di MTs YPI Subulul Huda Saentis guna meningkatkan kinerja guru. Dengan menerapkan strategi dan praktik manajemen kinerja yang tepat, sekolah dapat mengoptimalkan kinerja guru dan siswa, mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, dan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kebijakan, Kinerja Guru

PENDAHULUAN

Kebijakan Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam memajukan sistem pendidikan di suatu Negara. Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam makalah ini, kami akan membahas secara mendalam mengenai konsep dasar analisis kebijakan pendidikan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pembangunan di masa mendatang. Kebijakan (*Policy*) Istilah kebijakan (*policy*) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Beragamnya pandangan tentang istilah kebijakan, Stephen J. Ball(2012) menyatakan policy as text and discourse yang menarik untuk dielaborasi. Kebijakan menurut istilah dapat diartikan sebagai politik, program, keputusan aturan, konverensi, ketentuan, rencana strategis, serta pendapat yang sesuai lainnya.

Dalam suatu Kebijakan memiliki istilah-istilah lain dalam gambaran yang berbeda. Kebijakan bisa dapat di istilahkan dengan kecerdasan, keputusan, kemahiran serta kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat menjadi suatu rencana dasar dalam melakukan pekerjaan, juga dapat digunakan dalam kepemimpinan di pemerintahan untuk bertindak dan memberikan keputusan yang telah disepakati, serta dapat digunakan dalam organisasi untuk merancang pernyataan cita-cita yang menjadi tujuan, kebijakan juga dapat menjadi tujuan, prinsip sebagai pedoman dalam mencapai harapan yang sesuai tepat sasaran. Dalam konteks lain dijelaskan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif diantara sistem (Sagala, 2017)

Analisis suatu kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu konsep tata cara dalam menghasilkan informasi yang berbentuk sebuah kumpulan data-data pendidikan sebagai suatu pengarahan sebagai alat alternative untuk perumusan kebijakan dalam mengambil keputusan yang bersifat diplomatis dalam mengatasi masalah pendidikan (Hanisyi 2013). Analisis kebijakan pendidikan bertujuan untuk menganalisis data dan informasi pendidikan serta mempertahankan aspek-aspek didalam proses perancangan dan pembuatan suatu kebijakan. Proses dari pembuatan kebijakan meliputi dari menganalisis masalah, pengumpulan data terkait pendidikan, penentuan alternative hingga pada penyampaian alternative terhadap para pembentuk keputusan dalam pendidikan

Badjuri dan Yuwono menyampaikan bahwa terdapat lima poin utama kenapa analisis kebijakan penting: 1) Analisis kebijakan dilaksanakan menggunakan teknik ilmiah yang objektif, logis dan ilmiah. Artinya ketika analisis kebijakan dilakukan, penyusunan kebijakan dilaksanakan dengan cara saintifik oleh karena itu kebijakan tersebut bisa diukur dan dipertanggungjawabkan 2) analisis kebijakan yang dilaksanakan secara terfokus dan menyeluruh akan membentuk kebijakan yang sesuai dengan tujuan, sehingga mampu memajukan kesejahteraan rakyat negara. 3) analisis kebijakan bersifat multidimensional, interdependen, dan berkaitan sehingga penting dilakukan guna membentuk dampak yang komprehensif. 4) analisis kebijakan mampu membentuk arah implementasi kebijakan dan melaksanakan evaluasi. Bukti ini karena analisis kebijakan bisa bersifat konkret dan strategis, oleh karena itu bisa dipakai pada masa mendatang. 5) analisis kebijakan mampu membagikan peluang besar untuk rakyat agar bisa berkontribusi dalam upaya membentuk kebijakan (partisipasi publik). Oleh sebab itu analisis kebijakan publik mampu dijadikan objek yang dipakai untuk mewujudkan impian (Safitri et al., 2021).

Adapun fungsi lain analisis kebijakan pendidikan yaitu ada tiga fungsi, yang mana

apabila tiga fungsi tersebut tidak lengkap atau lebih maka target dalam analisis kebijakan tidak dapat tercapai. (Anesti Rohma, dkk. 2022).

1) Fungsi Alokasi. Dalam kegiatan analisis kebijakan pendidikan, fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi yang penting untuk diperankan. Hal ini berkaitan dengan mengalokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan pendidikan itu sendiri yang berlandaskan kajian terhadap isi-isu kebijakan pendidikan yang tingkatnya lebih makro dan strategis.

2) Fungsi Inquiri. Apabila semua atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan telah terlaksanakan dan mencapai hasilnya maka fungsi inquiri ini dapat dilaksanakan. Topik penelitian dari fungsi ini adalah komponen integral dari isu kebijakan strategis-politis. Kajian kegiatan analisis kebijakan pendidikan dalam fungsi inquiri ini bersifat komprehensif yang bisaberbentuk kajian metodologi atau kajian substansi.

3) Fungsi Komunikasi. Fungsi ini dapat dilakukan apabila analisis kebijakan pendidikan sudah menghasilkan berbagai usulan kebijakan yang realistis. Dalam fungsi komunikasi ada pihak-pihak untuk bisa melaksanakan tugas analisis kebijakan yaitu penyampaian alternatif atau gagasan kebijakan. Pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana, pengelola, peneliti, dan masyarakat luas sebagai konsumen pendidikan.

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang di capai seseorang) yaitu, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan padanya. Salah satu konsep terpenting dalam Manajemen Kinerja adalah adanya proses yang berkelanjutan dimulai dari aktivitas menentukan tujuan (*setting direction*), monitoring, pengukuran kinerja dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Para Manajer dituntut untuk menyadari bahwa perannya sangat diharapkan dalam proses manajemen kinerja secara konsisten. Serangkaian aktivitas Manajemen Kinerja memiliki tujuan untuk menyatukan persepsi para manajer, pegawai dan tim tentang apa saja yang harus di kerjakan. (Haryono, 2018)

Penilaian guru merupakan kendaraan penting untuk mempromosikan kualitas pendidikan yang diyakini berpotensi untuk memfasilitasi pengembangan profesional guru dan untuk merangsang perbaikan instruksional. Penilaian guru menjaui kegiatan ritual ala kadarnya yang terputus dari proses perbaikan pengajaran dan guru pengembangan profesional. Kontrak kinerja dan kinerja sistem penilaian adalah bagian dari sektor publik yang lebih luas reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan publik. (Candra Wijaya & Rahmat Hidayat, 2022)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan fokus pada analisis kinerja guru pendidik di sekolah. Temuan-temuan dari analisis literatur disusun secara sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk kesimpulan yang jelas. Metode penelitian ini melibatkan studi literatur, analisis data sekunder, dan wawancara dengan tokoh pendidikan di sekolah. Dengan mengacu pada literatur yang relevan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas dan mendalam tentang bullying dan ujaran kebencian pada mahasiswa.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang kami lakukan ialah mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber sebagai instrumen penelitian dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis melalui proses dan makna dan lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta pada lapangan. Pengumpulan data harus dilakukan secara teliti dan akurat untuk memastikan validitas hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja itu sendiri diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggungjawab-nya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan. Dengan demikian, dalam setiap kegiatan penilaian ujungnya adalah pengambilan keputusan. Penilaian kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk menilai kinerja guru dan juga pengawas. Hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengembangan pegawai, pemberian *reward*, perencanaan pegawai, pemberian kompensasi dan motivasi. (Candra Wijaya & Rahmat Hidayat, 2022)

Setiap pegawai dilingkungan organisasi manapun sudah tentu memiliki tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan deskripsi tugas yang diberikan pimpinan organisasi. Untuk meningkatkan kinerja guru di MTs YPI Subulul Huda Saentis, kepala sekolah menuangkan kebijakan yaitu:

1. Guru Wajib Mengumpulkan Dokumen Pembelajaran

Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh kepala sekolah adalah setiap guru harus

mengumpulkan dokumen pembelajaran pada setiap awal semester berjalan. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah menyampaikan dan senantiasa mengingatkan kewajibanguru ini pada setiap rapat awal semester. Pada awal semester, kepala sekolah melaksanakan rapat yang dilaksanakan secara kolosal, dimana perencanaan satu semester berjalan disampaikan. Setiap guru wajib membuat dokumen pembelajaran yang mencakup Silabus, RPP, dan rencana evaluasi pembelajaran. Selain itu, setiap guru jugadiminta untuk melaporkan kebutuhan selama proses pembelajaran dalam satu semester berjalan.

2. Membangun Komunikasi Terbuka Dengan Guru

Kedua, membangun komunikasi terbuka dengan guru. Kepala sekolah memberikan keterbukaan dan keleluasaan kepada guru di MTs YPI Subulul Huda Saentis untuk berkomunikasi, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Setiap guru diperkenankan untuk berkonsultasi kepada kepala sekolah baik yang berkaitan dengan urusan pribadi maupun yang berkenaan dengan urusan pekerjaan. Dalam hal waktu, kepala sekolah menyediakan waktu kapanpun untuk dapat dihubungi oleh guru MTs YPISubulul Huda Saentis. Hal ini selain memberikan kenyamanan kepada guru dalam beraktifitas, juga memberikan ketenangan apabila guru dihadapkan pada kondisi secara mendadak. Pada saat ada guru yang melanggar peraturan, atau guru yang mempunyai kinerja yang kurang. Maka kepala sekolah akan melakukan pendekatan secara personal untuk membina guru yang bersangkutan. Selain itu juga pada saat ada guru yang merasatidak puas atau keberatan dengan kebijakan yang telah dibuat, maka kepala sekolah tidakmembahas perkara itu di depan umum. Kepala sekolah akan memberikan perhatian kepada guru yang merasa tidak puas dengan keadaan dan kondisi di MTs YPI Subulul Huda Saentis. Dalam kondisi tersebut, kepala sekolah melalkukan pendekatan dengan memberikan pandangan-pandangan secara luas serta memberikan pemahaman kepada guru mengenai alasan sebuah keputusan diambil.

3. Kepala Sekolah Melakukan Supervisi

Setiap pekannya, kepala melakukan kunjungan ke kelas-kelas untuk melakukan supervise terhadap proses pembelajaran di kelas. Kunjungan kepala sekolah ke kelas dilaksanakan rutin minimal sekali pada setiap pekannya. Hal-hal yang diperhatikan olehkepala sekolah dalam kunjungan pekanan ini adalah pelaksanaan pembelajaran oleh guru, sikap siswa dalam proses pembelajaran, serta situasi dan kondisi ruangan kelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru merupakan upaya yang dilakukan guna mewujudkan pendidikan yang unggul, dan berkompeten. Peran kepala sekolah sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada para guru. Dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap guru, kepala sekolah dapat merancang kebijakan yang memotivasi guru untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pengajaran.

Selain itu, kepala sekolah juga perlu memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan oleh para guru, baik itu dalam hal pelatihan, bahan ajar, atau dukungan psikologis, tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan profesional para guru dan akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dengan demikian, kebijakan kepala sekolah yang proaktif dalam mendukung kinerja guru tidak hanya berdampak pada kualitas pengajaran, tetapi juga pada kesejahteraan dan motivasi seluruh komunitas sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, S. J. 2012. *Global education inc: New policy networks and the neo-liberal imaginary*. New York: Routledge
- Hanisy, Asmad, 2013, Konsep Dasar Analisis Kebijakan, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 4 (1), 48-63.
- Haryono, Siswoyo. 2018. *Manajemen Kinerja SDM Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Rohma Wardani, A., dkk, 2022, Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan, *Jurnal Education and Development*, 10 (3), 88-93.
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. 2021. Urgensi Analisis Kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72.
- Sagala, S., 2017, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta
- Wijaya, C., & Rahmat Hidayat. *Manajemen Kinerja*. Medan: Pusdikara Mitra Jaya.